

## **Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2024**

**Dimesty Inayathul Fitri<sup>1\*</sup> & Hendry Cahyono<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

\*e-mail : [dimestya.22207@mhs.unesa.ac.id](mailto:dimestya.22207@mhs.unesa.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

#### **Artikel Info**

**Received :**

10 June 2026

**Revised :**

12 June 2026

**Accepted :**

18 June 2026

**Kata Kunci :**

Kemiskinan; Pengangguran,  
Upah Minimum,  
Pertumbuhan Penduduk.

**Keywords :**

Poverty, Unemployment;  
Minimum Wage, Population  
Growth.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan yang penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama periode 2018–2024 secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan pertumbuhan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, UMK, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018–2024. Penelitian menggunakan data panel yang mencakup lima kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2018–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) melalui perangkat lunak Stata 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

---

### ***Determinants of District-Level Poverty in Sumatra Island The Effect Of Unemployment, Minimum Wage and Population Growth On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta (2018–2024)***

---

#### **ABSTRACT**

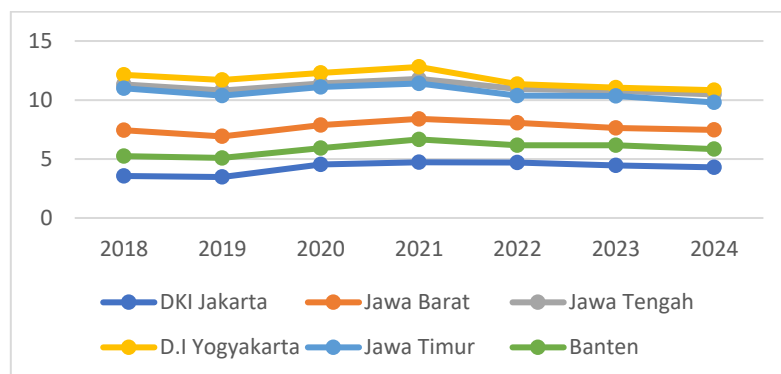
*This study was conducted to analyze the impact of high unemployment rates, the Regency/Municipal Minimum Wage (UMK), and population growth on poverty levels in Poverty remains a major development challenge in Indonesia, including in the Special Region of Yogyakarta (DIY), which consistently recorded the highest poverty rate among provinces on Java Island during the*

2018–2024 period. This condition highlights the need to identify factors influencing poverty, particularly unemployment, Regency/Municipal Minimum Wage (UMK), and population growth. This study aims to analyze the effects of unemployment, UMK, and population growth on poverty levels in the Special Region of Yogyakarta from 2018 to 2024. The study employs panel data covering five regencies/cities in the province during the 2018–2024 period. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis was conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach through Stata 17 software. The results indicate that unemployment has a positive and significant effect on poverty. Meanwhile, UMK has a negative and significant effect on poverty levels. On the other hand, population growth has a positive and significant effect on poverty. These findings may serve as a reference for local governments in formulating more effective and targeted poverty alleviation policies.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan saat ini, indikator keberhasilan ekonomi bukan saja diperhatikan melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga melalui kemampuan pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan di tengah dinamika perekonomian yang terus berubah. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai satu dari beberapa hambatan utama yang perlu diatasi pada proses pembangunan ekonomi menurut pandangan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi diukur bukan saja melalui peningkatan PDB, melainkan juga melalui sejauh mana negara tersebut berhasil mengurangi kemiskinan. (Todaro & Smith, 2006, dikutip dalam Zaqiah et al., 2023).

Kemiskinan menjadi masalah pembangunan yang masih dirasakan beberapa negara di dunia, terutama Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang. Sejalan dengan sasaran SDGs, untuk menghapuskan segala bentuk kemiskinan di mana pun berada, pemerintah Indonesia mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda utama dalam strategi pembangunan nasioanl. (Kurniati et al., 2025). Secara umum, kemiskinan merujuk pada kondisi ketika pendapatan yang diperoleh rumah tangga belum bisa mencukupi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan ataupun nonpangan, sehingga tidak mampu menjamin keberlangsungan hidup (Amelia et al., 2024).



**Gambar 1.** Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2024

Dari Gambar 1 sepanjang periode 2018 hingga 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan konsisten mencatat kemiskinan paling besar di Pulau Jawa. Tren yang serupa terlihat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana grafik indikator tersebut menunjukkan stabilitas yang konstan pada tingkat yang terhitung tinggi. Jawa Barat berada pada posisi menengah, sementara DKI Jakarta dan Banten terus mempertahankan tingkat kemiskinan yang stabil serta rendah dari tahun ke tahun. Secara umum, seluruh provinsi mengalami fluktuasi ringan, dengan lonjakan yang cukup jelas dalam masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, kemudian menurun dan pulih pada periode setelahnya.

Pengangguran dapat menjadi satu dari beberapa penyebab yang dapat menaikkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan pendapat Azizah et al. (2024), tingkat pengangguran yang besar akan memperlambat pertumbuhan produktivitas ekonomi wilayah hingga menambah beban sosial yang ditanggung masyarakat, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih rentan terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan. Data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY (2024) mengonfirmasi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten menempati urutan terendah dalam hal angka pengangguran di Pulau Jawa sepanjang periode 2018-2024. Pada tahun 2020-2021 Kota Yogyakarta mencatat angka TPT lebih dari 9% akibat pandemi COVID-19. Sinyal positif penurunan angka tuna karya ini mulai terdeteksi sejak tahun 2022 di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Hingga tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah DIY secara umum mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan masa puncak krisis pandemi, yang menjadi indikator kuat adanya pemulihan sektor ekonomi.

Tingginya angka pengangguran dapat menjadi penyebab utama meningkatnya kemiskinan, terutama karena tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk menopang kehidupan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam penyebaran kesempatan kerja turut berkontribusi meningkatkan angka pengangguran (Marpaung et al., 2024). Ketidakseimbangan ini timbul akibat total tenaga kerja yang siap bekerja lebih dari total lapangan pekerjaan yang ada (Adriyanto et al., 2020). Individu atau kelompok yang memiliki pekerjaan mampu memperoleh penghasilan yang diterapkan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui terpenuhinya kebutuhan tersebut, mereka tidak akan mengalami kemiskinan (Gebila & Wulandari, 2021). Temuan Feriyanto et al. (2020) menunjukkan apabila meningkatnya jumlah pengangguran berkorelasi dengan naiknya angka kemiskinan secara signifikan di Provinsi yang ada di Indonesia. Sebaliknya, temuan Mahendra serta Juardi (2024) membuktikan apabila pengangguran tidak memberikan dampak secara signifikan pada kemiskinan di Kota Makassar.

Upah minimum juga menjadi satu dari beberapa penyebab yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menangani permasalahan ini, salah satunya melalui kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penetapan upah minimum. Di Provinsi DIY, besaran UMK tergolong rendah jika diperbandingkan dengan sebagian besar provinsi lain pada kawasan Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DIY (2024), pada tahun 2024, UMK paling tinggi ada di Kota Yogyakarta sebesar Rp2.492.997, sementara UMK paling rendah ada di Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp2.188.041. UMK tersebut belum mencapai nilai rata-rata UMK Provinsi Jawa Barat serta Jawa Tengah yang telah melampaui Rp2,5 juta. Rendahnya UMK ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat yang terbatas, sehingga menghambat upaya mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah diyakini dapat meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat, yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan hidup, serta membantu mereka terbebas dari jerat kemiskinan (Alfajri, 2024). Di sisi lain,

peningkatan upah berpotensi menekan permintaan tenaga kerja karena adanya korelasi terbalik antara upah serta kesempatan kerja, di mana kenaikan upah tersebut bisa mengurangi jumlah lapangan pekerjaan serta menaikkan tingkat pengangguran, sehingga mendorong angka kemiskinan (Kurniawan et al., 2024). Sehingga demikian, efektivitas kebijakan upah minimum dalam menurunkan kemiskinan bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan stabilitas lapangan kerja. Temuan Sari (2021) menunjukkan apabila upah minimum yang naik berkorelasi pada menurunnya kemiskinan secara signifikan di Jawa Tengah. Sebaliknya, temuan Nasri et al. (2024) menunjukkan apabila upah minimum tidak memberikan dampak signifikan kepada perubahan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan penduduk dapat menjadi satu dari beberapa penyebab yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai aspek fundamental dalam demografi karena memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur (Rohmah, 2024). Di sisi lain, publikasi Badan Pustaka Statistik Provinsi DIY (2024) juga memaparkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tiap kabupaten/kota di D.I Yogyakarta menunjukkan pola fluktuatif dalam periode 2018-2024. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul mencatat tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2,11% dan 1,94%, kemudian cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya. Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan yang cukup tajam hingga mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hampir mendekati nol pada akhir periode pengamatan. Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih stabil dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika pertumbuhan penduduk yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial ekonomi, khususnya kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Nelson dan Liveztain (dikutip dalam Fathurohman et al., 2022) menyatakan apabila ditemukan korelasi langsung antara laju pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat, di mana di negara berkembang, peningkatan jumlah penduduk justru cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan dan memperbesar jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dengan baik dapat menjadi faktor pendorong produktivitas melalui peningkatan jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya mampu memutus rantai kemiskinan (Septadarma & Rambe, 2024). Namun, menurut Zaqiah et al. (2023), pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan tantangan bagi pemerintah sebab meningkatnya banyak penduduk yang tidak seimbang terhadap perluasan lapangan kerja dapat meningkatkan kemiskinan. Temuan Praja et al. (2023) membuktikan apabila meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berpotensi diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di DKI Jakarta. Sebaliknya, temuan Rudianto et al. (2021) membuktikan apabila pertumbuhan penduduk tidak menyajikan dampak signifikan bagi angka kemiskinan di Jawa Timur.

Berbagai riset terdahulu membuktikan hasil yang berbeda-beda terkait dampak pertumbuhan penduduk, ketentuan upah minimum di wilayah kabupaten/kota, hingga tingkat pengangguran pada taraf kemiskinan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami hubungan pengangguran, upah minimum kabupaten/kota, hingga pertumbuhan penduduk pada kemiskinan, khususnya dalam konteks Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan dengan hal tersebut, berbagai rangkaian permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, seperti tingginya tingkat kemiskinan yang masih konsisten di Provinsi D.I. Yogyakarta, fluktuasi pengangguran, disparitas upah minimum kabupaten/kota, serta pertumbuhan penduduk yang tidak merata antarwilayah,

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata antar kabupaten/kota. Berangkat dari latar belakang tersebut, guna menganalisis seberapa besar pengaruh faktor upah minimum kabupaten/kota, pengangguran, serta pertumbuhan penduduk atas tingkat kemiskinan di DIY, penelitian ini dinilai krusial untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis menyusun riset ini dengan judul, “Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2024.

## METODE

Riset ini menerapkan metode pendekatan regresi data panel yang diolah dengan perangkat lunak Stata versi 17. Merujuk pada pandangan Gujarati dan Porter (2009), penggunaan data panel yang memadukan *cross section* serta *time series* menawarkan berbagai kelebihan. Keunggulan tersebut meliputi kesediaan informasi yang lebih kaya serta peningkatan jumlah observasi, yang berimplikasi pada tingginya derajat kebebasan dan efisiensi hasil estimasi. Secara spesifik, riset ini memanfaatkan data runtut waktu periode 2018-2019 yang diintegrasikan dengan data silang tempat dari lima wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpaduan kedua jenis data tersebut menghasilkan 35 observasi. Variabel yang dianalisis mencakup satu variabel dependen (Y), yakni angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), serta tiga variabel independen (X), mencakup tingkat pengangguran terbuka, UMK, hingga pertumbuhan penduduk. Seluruh data variabel didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

Lebih lanjut, Gujarati dan Porter (2019) menjelaskan bahwa estimasi regresi data panel bisa dioperasikan lewat tiga alternatif model dasar, yakni *pooled Least Square*, *Fixed Effect Model*, serta *Random Effect Model*. Guna menentukan model mana yang paling proposional untuk diterapkan, peneliti melakukan serangkaian uji pemilihan model yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman, serta Uji *Lagrange Multiple*. Apabila model spesifik yang paling optimal telah terpilih, tahapan analisis dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang memuat uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Proses ini kemudian diakhiri dengan uji hipotesis, yang mencakup uji parsial (*t-test*), uji simultan (*f test*), serta pengukuran koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Model regresi data panel pada riset ini memiliki rumus meliputi:

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 PP_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

K	= Kemiskinan
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Regresi koefisien variabel independen
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/kota
PP	= Pertumbuhan Penduduk
i	= Data cross section
t	= Data time series
e	= Error term

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil****Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif pada riset menyajikan ilustrasi mengenai suatu data dari skor paling tinggi, skor paling rendah, standar deviasi, serta skor rata-rata. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan empat variabel operasional. Kemiskinan diposisikan menjadi variabel terikat, sedangkan tiga variabel bebas yang mempengaruhi terdiri dari pertumbuhan penduduk, upah minimum Kabupaten/Kota, serta Tingkat Pengangguran Terbuka. Rangkuman dari pengujian statistik deskriptif untuk setiap variabel independen diuraikan meliputi:

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

Variabel	Kemiskinan	TPT	UMK	PP
Obs	35	35	35	35
Mean	12,21	3,95	1903455,54	1,03
Std. dev.	4,38	1,93	257301,75	0,52
Min	6,26	1,49	1454200,00	0,16
Max	18,38	9,16	2492997,00	2,11
Unit	Persen	Persen	Juta	Persen
Obs	35	35	35	35

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 4.1 bisa dijelaskan hasil statistik deskriptif pada setiap variabel adalah meliputi:

**Kemiskinan**

Variabel kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi DIY pada rentang waktu 2018–2024 membuktikan adanya variasi data. Hal ini terlihat dari skor minimum sebanyak 6,26% serta skor sebanyak sebesar 18,38%, sehingga tingkat kemiskinan tidak seragam antar kab/kota.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Untuk indikator pengangguran terbuka, diperoleh *mean* sebesar 3,95%. Rentang data berada di antara titik terendah 1,49% hingga persentase maksimum mencapai 9,16%. Lebarnya jarak antara capaian minimum dan maksimum ini mengindikasikan tingginya ketimpangan peluang kerja antar wilayah kabupaten dan kota yang diobservasi.

**Upah Minimum Kabupaten/Kota**

Terkait besaran standar upah, rata-rata yang tercatat dalam observasi ini adalah sebesar Rp1.903.455,54. Adapun nilai paling kecil menyentuh angka Rp.1.454.200,00 dan capaian terbesar terekam pada nominal Rp.2.492.997,00. Variansi besaran angka tersebut mencerminkan adanya diversitas dalam implementasi kebijakan penetapan upah pekerja di tiap-tiap daerah kabupaten/kota.

**Pertumbuhan Penduduk**

Pada variabel laju demografi ini, angka rata-rata yang terbentuk mencapai 1,03%. Nilai terendah berada di level 0,16%, sedangkan batas paling tinggi menyentuh angka 2,11%. Fluktuasi pada rentang nilai ini merupakan representasi dari keberagaman dinamika pertumbuhan populasi penduduk pada setiap Kawasan kabupaten/kota yang diteliti.

**Hasil Uji Model Estimasi Regresi Data Panel**

Tahap krusial pada regresi data panel merupakan mengidentifikasi model estimasi yang paling valid di antara tiga alternatif: *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model*, serta

*Random Effect Model*. Penetapan model terbaik tersebut diuji secara berjenjang lewat uji Chow, Uji Hausman, serta Uji *Lagrange Multiplier*.

### Uji Chow

Uji Chow dioperasikan guna membandingkan kelayakan antara PLS dan FEM. Jika signifikansi menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya FEM lebih unggul dibandingkan PLS, sehingga analisis wajib diteruskan ke tahap Uji Hausman. Sebaliknya, apabila skor probabilitas  $> 0,05$ , maka modelnya ialah Pooled Least Squared serta analisis diteruskan melalui Uji *Lagrange Multiplier*.

**Tabel 2.** Hasil Uji Chow

Signifikansi Level	Prob
Prob > F	0,0000

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 2 terbukti ketika skor prob. sebanyak  $0,0000 < 0,05$ , sehingga model terpilih ialah Fixed Effect Model (FEM) dan diteruskan uji hausman.

### Uji Hausman

Selanjutnya, Uji Hausman diaplikasikan dalam memilih model terbaik antara FEM serta REM, apabila hasil pengujian angka probabilitas di bawah alpha 5%, maka model yang terpilih secara final adalah FEM, serta Uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan lagi. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi melampaui 0,05, REM dianggap lebih tepat, yang berarti penelitian harus berlanjut ke Uji *Lagrange Multiplier*.

**Tabel 3.** Hasil Uji Hausman

Signifikansi Level	Prob
Prob > Chi2	0,0039

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan output empiris pada Tabel 3, didapatkan skor probabilitas  $0,0039 < 0,05$ . Temuan tersebut menegaskan apabila *Fix Effect Model* merupakan model estimasi yang paling optimum untuk data ini. Oleh sebab itu, Uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu lagi diselenggarakan karena konsistensi hasil Uji Chow serta Uji Hausman telah sepakat mengarah terhadap FEM. Langkah berikutnya setelah penguncian model terbaik ini adalah melakukan serangkaian uji asumsi klasik.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan dalam menentukan apabila model regresi yang dipakai mencukupi kelayakan dari segi statistik. Uji tersebut bertujuan untuk menilai apakah model terbebas atas masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sehingga demikian, hasil estimasi yang dihasilkan bisa diinterpretasikan dengan valid.

### Uji Multikolinearitas

Evaluasi multikolinearitas ditujukan dalam mendeteksi apakah ada hubungan linear yang saling mengikat secara kuat di antara variabel penjelas. Identifikasi gejala ini mengacu pada besaran matriks korelasi antar-variabel bebas. Mengikuti kriteria Gujarati dan Porter (2009), indikasi multikolinearitas dinyatakan ada jika skor koefisien korelasi

antar-variabel independen ada di atas 0,80. Namun, jika angka korelasi tersebut ada di bawah batas 0,80, maka model regresi dinyatakan bersih dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 4.** Uji Multikolinearitas

	TPT	UMK	PP
TPT	1,0000		
UMK	0,3822	1,0000	
PP	-	-	1,0000
	0,2265	0,4860	

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 4. hasil uji multikolinearitas menunjukkan apabila skor hubungan antar variabel independent sebanyak 0,3822, -0,2265, dan -0,4860 yang berarti nilai tersebut  $< 0,80$ , yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas berfungsi untuk memeriksa stabilitas varians dari residual di sepanjang periode observasi. Deteksi gangguan ini dalam konteks data panel dijalankan lewat prosedur Uji *Breusch Pagan* atau *Cook Weisberg*. Kriteria keputusannya yaitu jika skor signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka teridentifikasi adanya gejala heteroskedastisitas. Sementara, jika probabilitasnya bernilai di atas 0,05, model regresi dinilai bersifat homoskedastisitas alias bebas dari gangguan varians residual (Gujarati dan Porter, 2009).

**Tabel 5.** Uji Heterokedastisitas

Signifikansi Level	Prob
Prob > Chi2	0,1178

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 5. hasil uji heterokedastisitas membuktikan apabila skor prob. sebanyak  $0,1178 > 0,05$ , maknanya tidak ditemukan gejala heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi maupun korelasi serial dimanfaatkan untuk menelisik eksistensi korelasi antara *error term* pada waktu ke  $t$  dengan *error term* pada masa lampau pada subjek amatan yang sama. Kehadiran kendala ini diuji menggunakan metode *Wooldridge Test* via sintaks perintah *xtserial* di program Stata. Jika skor probabilitas mengindikasikan angka di bawah 0,05, maka disimpulkan terdapat pelanggaran autokorelasi pada model. Sementara itu, apabila skor probabilitas bertengger di atas 0,05, maka asumsi *non autokorelasi* terpenuhi (Wooldridge, 2003).

**Tabel 6.** Uji Autokorelasi

Signifikansi Level	Prob
Prob > F	0,0384

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 6 hasil uji autokorelasi membuktikan apabila skor prob. sebanyak  $0,0384 < 0,05$ , yang artinya terjadi gejala autokorelasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan robust pada standard error.

**Regresi Data Panel**

**Tabel 7.** Perbandingan Hasil Dalam Regresi Data Panel

Variabel	PLS	FEM	REM	FEM Robust
TPT	-1,627*** (6,29)	0,288** (2,14)	0,191 (0,143)	0,288** (3,47)
UMK	-2,06 (-0,95)	-1,91*** (-4,01)	-1,92*** (5,82)	-1,91* (-2,39)
PP	0,924 (0,90)	0,357 (1,52)	0,393 (0,286)	0,357*** (5,19)
Constant	21,603*** (4,541)	14,333*** (1,081)	14,703*** (1,795)	14,333*** (1,436)
R <sup>2</sup>	(0,6230)	0,5597	0,6231	0,5597
F-Statistic	19,73	11,44		14,18

Tingkat Signifikansi

\*\*\* p<0,01 (1%); \*\* p<0,05 (5%); \* p<0,1 (10%)

Sumber : data diolah, 2026.

Menurut Tabel 7. model Fixed Effect Model (FEM) dengan robust, maka didapatkan persamaan analisis regresi data panel meliputi:

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 UMK_{it} - \beta_3 PP_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

$$K_{it} = 14,333 + 0,288TPT_{it} - 1,91UMK_{it} + 0,357PP_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan Tabel 7. hasil estimasi model FEM Robust adalah sebagai berikut:

Skor konstanta sebanyak 14,33 yang berarti apabila TPT, UMK, serta pertumbuhan penduduk bernilai nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 14,33%. Selanjutnya, melalui asumsi variabel lain tetap konstan.

Koefisien TPT sebanyak 0,288 membuktikan apabila meningkatnya TPT sebanyak 1% akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 0,288% melalui asumsi variabel lain tetap konstan. Sebaliknya, penurunan 1% pengangguran akan menurunkan kemiskinan sejumlah 0,288%.

Koefisien UMK sebesar -1,91 mengindikasikan bahwa kenaikan UMK sebanyak 1 satuan (juta rupiah) akan mengurangi kemiskinan sebanyak 1,91% melalui asumsi variabel lain tetap konstan. Dan sebaliknya, penurunan 1 juta rupiah UMK akan menaikkan angka kemiskinan sejumlah 1,91%.

Koefisien pertumbuhan penduduk sebanyak 0,357 membuktikan apabila meningkatnya pertumbuhan penduduk sebanyak 1% akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 0,357% melalui asumsi variabel lain tetap konstan. Dan kebalikannya, penurunan 1% pertumbuhan penduduk dapat mengurangi angka kemiskinan senilai 0,35%.

**Uji Hipotesis**

**Uji t (Parsial)**

Uji t parsial diterapkan dalam menganalisis sejauh mana pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian ini bersandar pada tiga tingkat signifikansi, yakni 1%, 5%, dan 10%. Variabel bebas dinyatakan memiliki pengaruh nyata apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sebaliknya, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan estimasi pada Tabel 7, diperoleh skor *t-statistik* untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejumlah 3,74 dengan signifikan pada taraf 5%, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sejumlah 2,39

dengan signifikan pada taraf 10%, dan pertumbuhan penduduk sebesar 5,19 dengan signifikan pada taraf 1%. Untuk memformulasikan nilai  $t_{tabel}$  dalam pengujian ini, digunakan beberapa parameter dasar sebagai berikut:

$\alpha$  : 1%, 5%, 10%

$n$  : 35 (jumlah observasi)

$k$  : 4 (jumlah variabel)

$df$  : degree of freedom ( $n - k$ )

$$\begin{aligned} t - \text{tabel (TPT)} &= \alpha ; df \\ &= 0,05 ; (35 - 4) \\ &= 0,05 ; 31 \\ &= 2,04 \end{aligned}$$

Secara spesifik, variabel TPT terbukti membawa pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta karena besaran skor  $t_{statistik}$  melampaui nilai penolakannya di  $t_{tabel}$  ( $3,73 > 2,04$ ).

$$\begin{aligned} t - \text{tabel (UMK)} &= \alpha ; df \\ &= 0,1 ; (35 - 4) \\ &= 0,1 ; 31 \\ &= 1,70 \end{aligned}$$

Variabel upah minimum kabupaten/kota mampu memberikan dampak signifikan kepada kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta sebab skor t-statistik ( $2,39 > t\text{-tabel}$  ( $1,70$ )). Koefisien yang bernilai negatif ini membuktikan apabila upah minimum memiliki hubungan negatif kepada tingkat kemiskinan.

$$\begin{aligned} t - \text{tabel (PP)} &= \alpha ; df \\ &= 0,01 ; (35 - 4) \\ &= 0,01 ; 31 \\ &= 2,74 \end{aligned}$$

Variabel pertumbuhan penduduk mampu memberikan dampak signifikan kepada kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta karena skor t-statistik ( $5,19 > t\text{-tabel}$  ( $2,74$ )).

### Uji F (Simultan)

Sementara itu, Uji F (simultan) diaplikasikan untuk menilai apakah semua variabel independen secara bersamaan berkontribusi terhadap variabel dependen, dengan ambang batas kesalahan sebesar 5%. Kriteria keputusannya menunjukkan bahwa jika  $F_{statistik} > F_{tabel}$ , kelompok variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara simultan. Jika terjadi sebaliknya  $F_{statistik} < F_{tabel}$ , maka kontribusi bersama dianggap tidak signifikan. Merujuk pada output Tabel 7, nilai  $F_{statistik}$  yang diperoleh adalah sebesar 14,18. Adapun parameter penentu nilai  $F_{tabel}$  mencakup beberapa komponen acuan sebagai berikut.

$\alpha$  : 5%

$n$  : 35 (jumlah observasi)

$k$  : 4 (jumlah variabel)

$df_1$  : degree of freedom ( $k - 1$ )

$df_2$  : degree of freedom ( $n - k$ )

$$\begin{aligned} F - \text{tabel} &= \alpha ; df_1 ; df_2 \\ &= 0,05 ; (4 - 1) ; (35 - 4) \\ &= 0,05 ; 3 ; 31 \\ &= 2,91 \end{aligned}$$

Melalui komparasi ini, diperoleh kesimpulan apabila variabel pengangguran terbuka, UMK, serta pertumbuhan penduduk secara bersamaan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY, mengingat nilai  $F_{statistik}$  (14,18) lebih besar daripada  $F_{tabel}$  (2,91).

### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi dalam melakukan penilaian terhadap bagaimana model dapat menerangkan variasi dari variabel dependen. Berdasarkan Tabel 7. hasil regresi data panel membuktikan apabila skor Adjusted R-squared ( $R^2$ ) sebesar 0,5597 maupun 55,97%. Maknanya, variasi variabel dependen, yaitu kemiskinan bisa dideskripsikan oleh variabel independen, yaitu pengangguran, UMK, serta pertumbuhan penduduk sebanyak 55,97%, sementara sisanya sebesar 44,03% (100-55,97%) dideskripsikan oleh variabel lain di luar riset ini.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan**

Hasil estimasi empiris menegaskan apabila pengangguran terbuka membawa implikasi positif signifikan terhadap derajat kemiskinan. Maknanya, setiap lonjakan pada angka tuna karya akan diikuti oleh tren peningkatan jumlah kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Secara teoritis, pengangguran merefleksikan ketidakmampuan struktur ekonomi dalam menyerap angkatan kerja secara optimal sesuai kapasitas pasar yang tersedia. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan otomatis kehilangan sumber pendapatan utama atau hanya memperoleh pemasukan yang sangat minim. Penurunan pendapatan ini secara langsung memangkas daya beli masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok vital meliputi pakaian, makanan, akses kesehatan, hingga pendidikan. Rentetan kondisi inilah yang mendegradasi tingkat kesejahteraan rumah tangga dan mendorong mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Pada Provinsi D.I. Yogyakarta, dampak signifikan positif dari pengangguran ke kemiskinan juga dipengaruhi oleh kondisi struktur pasar kerja yang masih didominasi oleh sektor informal. Pekerja pada sektor informal umumnya memiliki pendapatan yang tidak tetap, tingkat keamanan kerja yang rendah, serta perlindungan sosial yang terbatas, sehingga lebih rentan kehilangan pekerjaan ketika terjadi perlambatan atau tekanan ekonomi. Akibatnya, pekerja sektor informal lebih mudah mengalami pengangguran maupun penurunan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya meningkatkan risiko kemiskinan. Selaras terhadap temuan tersebut, Sibagariang et al. (2023) mengungkapkan apabila sektor informal lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme penyangga sosial dan ekonomi dalam jangka pendek dibandingkan sebagai solusi permanen untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal di Provinsi D.I. Yogyakarta turut memperkuat hubungan antara meningkatnya pengangguran dan bertambahnya tingkat kemiskinan. Kesempatan kerja formal yang relatif terbatas menyebabkan sebagian masyarakat harus bergantung pada pekerjaan dengan tingkat pendapatan rendah dan tidak memiliki kepastian ekonomi. Menurut Kamelia dan Nugraha (2021), sektor informal sering menjadi pilihan alternatif karena akses terhadap pekerjaan formal masih cukup terbatas, meskipun pendapatan yang diperoleh cenderung lebih rendah dibandingkan sektor formal. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pengangguran dapat secara langsung dan cepat menurunkan pendapatan rumah tangga hingga berada di ambang batas kemiskinan.

Fakta empiris ini sejalan dengan studi terdahulu oleh Feriyanto et al. (2020), yang menemukan bahwa pengangguran memicu kenaikan kemiskinan pada tingkat provinsi di Indonesia. Konformitas hasil juga didukung oleh riset Ngubane et al. (2023) di Afrika Selatan yang mengonfirmasi relasi positif dan signifikan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan. Kendati demikian, output penelitian ini bertolak belakang dengan kajian Mahendra dan Juardi (2024) di Kota Makassar, yang menyimpulkan bahwa meskipun pengangguran terbuka berarah positif, efeknya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan anomali ini dipengaruhi oleh karakteristik demografi Kota Makassar, di mana mayoritas tuna karya didominasi oleh kelompok terdidik yang cenderung sedang merintis usaha mandiri atau masih ditopang secara finansial oleh keluarga mereka, sehingga naiknya pengangguran tidak serta-merta mengerek angka kemiskinan di wilayah tersebut.

### **Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan**

Dari temuan riset, diketahui ketika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terbukti memberikan dampak signifikan negatif ke tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan kenaikan nilai UMK bisa berdampak dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam konteks riset ini, kenaikan UMK memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pekerja formal yang berada pada kelompok berupah rendah, terutama rumah tangga yang posisinya berada di sekitar garis kemiskinan. Tambahan pendapatan tersebut menjadi sangat berarti karena rumah tangga miskin pada umumnya memiliki kapasitas konsumsi yang terbatas dan sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil tetap dapat memberikan dampak secara langsung memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan UMK berpotensi mengurangi kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) sekaligus menurunkan tingkat kerentanan rumah tangga miskin agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi tekanan atau guncangan ekonomi.

Selain memberikan dampak langsung kepada pekerja formal, peningkatan UMK juga berpotensi menimbulkan pengaruh tidak langsung melalui penguatan daya beli masyarakat. Kelompok pekerja yang tingkat upah rendah umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehingga kenaikan pendapatan cenderung segera diikuti oleh peningkatan permintaan atas jasa serta barang di tingkat lokal. Naiknya konsumsi masyarakat selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, memperkuat pendapatan pelaku usaha kecil dan UMKM, serta membuka peluang peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat lain yang bergantung pada aktivitas ekonomi setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Merdikawati dan Izzati (2024) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum memiliki potensi dalam menurunkan tingkat kemiskinan apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan kelompok pekerja yang berada pada lapisan terbawah distribusi pendapatan. Oleh karena itu, UMK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap tingkat pendapatan pekerja formal, tetapi juga berperan sebagai pendorong munculnya efek pengganda ekonomi lokal (*local multiplier effect*), sehingga manfaat kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja penerima upah secara langsung, tetapi juga dapat menyebar kepada kelompok masyarakat lain yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kemiskinan.

Temuan riset ini juga selaras terhadap hasil oleh Sari (2021) yang mengindikasikan upah minimum berdampak signifikan ke tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan demikian, hasil riset ini turut didukung oleh riset Mahendra bersama Juardi

(2024) yang membuktikan apabila upah minimum berdampak signifikan negatif ke angka kemiskinan di Kota Makassar. Namun demikian, temuan riset tidak selaras terhadap riset oleh Nasri et al. (2024) menunjukkan upah minimum tidak memberikan dampak signifikan ke tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil berbeda ini bisa dijelaskan oleh keadaan distribusi pendapatan yang belum merata sesuai dengan standar upah minimum serta penetapan kebutuhan hidup layak yang dinilai belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat pada masing-masing wilayah, sehingga efektivitas kebijakan upah minimum dalam menurunkan kemiskinan bisa tidak serupa antar beberapa wilayah.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan**

Dari hasil pengujian, menunjukkan jika peningkatan penduduk terbukti memberikan pengaruh signifikan positif ke angka kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika laju pertumbuhan penduduk meningkat, yakni angka kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta juga berpotensi meningkat. Pada konteks riset ini, hubungan tersebut dapat menjadi semakin kuat apabila penambahan jumlah penduduk tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dan jumlah pencari kerja, sementara pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan tidak selalu mampu mengikuti kecepatan pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja menjadi terbatas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pengangguran maupun munculnya pekerjaan yang kurang layak. Akibatnya, kerentanan masyarakat terhadap kondisi kemiskinan menjadi semakin besar. Selain itu, keterbatasan jumlah lapangan kerja formal juga mendorong sebagian angkatan kerja untuk masuk ke sektor informal yang umumnya memiliki tingkat upah relatif rendah, pendapatan yang tidak menentu, serta perlindungan kerja yang terbatas, sehingga kondisi ekonomi rumah tangga menjadi kurang stabil dan risiko jatuh ke dalam kemiskinan maupun bertahan dalam kondisi miskin semakin meningkat.

Pertumbuhan penduduk tidak hanya memberikan tekanan terhadap kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga berdampak meningkatnya kebutuhan masyarakat atas berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Menurut Putri dan Yefriza (2025), apabila peningkatan penduduk tidak diikuti peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, akses layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan yang memadai, maka kualitas sumber daya manusia dan tingkat produktivitas masyarakat berpotensi mengalami hambatan sehingga jumlah kelompok rentan dapat meningkat dan angka kemiskinan cenderung bertambah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, ketersediaan air bersih, serta berbagai bentuk layanan publik lainnya juga akan terus meningkat. Apabila peningkatan kebutuhan tersebut tidak diikuti oleh pengembangan kapasitas layanan maupun peningkatan kualitas pelayanan yang tersedia, maka akses masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi semakin terbatas atau membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memperoleh layanan tersebut. Dampaknya, sebagian besar pendapatan rumah tangga akan lebih banyak dimanfaatkan dalam mencukupi keperluan dasar sehingga kemampuan berinvestasi pada pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas hidup menjadi berkurang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan menyebabkan kemiskinan cenderung terus berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Temuan riset ini juga selaras terhadap temuan riset oleh Praja et al. (2023) yang mengungkapkan apabila peningkatan penduduk memberikan pengaruh signifikan positif ke kondisi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan demikian, perolehan riset ini diperkuat oleh riset Tampubolon bersama Muda (2021) yang menemukan apabila pertumbuhan penduduk berdampak signifikan positif ke tingkat kemiskinan di 27 negara di kawasan Eropa. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak selaras terhadap riset oleh Rudianto et al. (2021) yang membuktikan apabila pertumbuhan penduduk tidak memberikan dampak yang signifikan ke tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan hasil tersebut bisa dijelaskan karena kondisi bertambahnya penduduk di Jawa Timur diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang relatif mampu menyerap penambahan penduduk, sehingga pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan kemiskinan menjadi lebih rendah dan cenderung tidak signifikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta pertumbuhan penduduk pada tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2018–2024, bisa dipahami jika tingkat pengangguran mempunyai korelasi signifikan positif ke angka kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan pada sektor formal serta masih dominannya sektor informal menyebabkan sebagian masyarakat hanya memperoleh pendapatan yang relatif rendah, tidak stabil, dan kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara optimal, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terletak di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, variabel UMK memberikan dampak signifikan negatif ke angka kemiskinan, maknanya kenaikan upah bagi kelompok pekerja dengan pendapatan rendah dapat meningkatkan kemampuan daya beli rumah tangga, memperbesar tingkat konsumsi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pergerakan aktivitas ekonomi di daerah sehingga turut berkontribusi dalam menurunkan dan menekan angka kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk juga menunjukkan hubungan signifikan positif ke tingkat kemiskinan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh meluasnya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas serta layanan publik yang memadai berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang semakin besar sehingga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Pemerintah daerah harus memperkuat dan mengoptimalkan berbagai upaya strategis melalui penciptaan lapangan kerja formal, meningkatkan kualitas SDM, penerapan kebijakan pengupahan yang lebih mendukung kesejahteraan pekerja, serta peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mengurangi dampak pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, riset berikutnya dianjurkan memperbanyak variabel yang relevan, meningkatkan rentang waktu penelitian, serta memperluas cakupan wilayah kajian agar tidak hanya terbatas pada satu provinsi, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan provinsi lain sekaligus memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik dan kondisi antarwilayah secara lebih komprehensif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2), 463440. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Alfajri, S. S. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)*, 1(4), 1316–1329. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i4.24>
- Amelia, R., Intan, R. P. K., Vanessa, S. P., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung (2013-2023). *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(2), 69–79. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i2.1307>
- Azizah, L. N., Pasaribu, J. R. S., Hutagalung, I., Purba, A. A., & Sinaga, S. A. (2024). Analisis Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11641452>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota—Tabel Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-kabupaten-kota--persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2024a). Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2024—Tabel Statistik. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMzNDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2024b). Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota—Tabel Statistik. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2024c). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota—Tabel Statistik. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIxIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--menurut-kabupaten-kota--persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2024d). Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjcyIzI=/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta--rupiah-bulan-.html>
- Fathurohman, F., Fitriana, D., Baharta, R., & Mukminah, N. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan. *Journal of Public Power*, 6(2), 104–112. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6105>
- Feriyanto, N., Aiyubbi, D. E., & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>

- Gebila, G., & Wulandari, A. (2021). PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009-2018. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 3(2), 23–34. <https://doi.org/10.51877/mnjm.v3i2.173>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 205–221. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i1.38786>
- Kurniati, E., Ananda, G. A. K., Indriyani, L., & Ramadhan, B. A. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Wilayah Bandar Lampung (2020-2024). *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(4), 1184–1191. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i4.8229>
- Kurniawan, M. R. D., Salam, A., Utami, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Pendidikan Terhadap Persentase Kemiskinan Dalam Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 640–651. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14416000>
- Mahendra, T., & Juardi, J. (2024). Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.24252/best.v4i1.47533>
- Marpaung, F. J., Siregar, J., Simamora, C., Surbakti, G., Ginting, V., & S, I. M. S. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana. *TAMIKA: Jurnal Tugas Akhir Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 4(2(SEMNASTIK)), 249–253.
- Merdikawati, N., & Izzati, R. A. (2025). Minimum Wage Policy and Poverty in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 39(1), 191–210. <https://doi.org/10.1093/wber/lhae022>
- Nasri, M., Nujum, S., & Arfah, A. (2024). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1.1). <https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i1.6931>
- Ngubane, M. Z., Mndebele, S., & Kaseeram, I. (2023). Economic growth, unemployment and poverty: Linear and non-linear evidence from South Africa. *Heliyon*, 9(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20267>
- Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*, 6(1), 78–86. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.656>
- Putri, C., & Yefriza, Y. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 266–275. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859>
- Rohmah, N. A. (2024). Aplikasi Model Pertumbuhan Logistik untuk Estimasi Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(01), 762–771. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6163>
- Rudianto, B., Susilaningsih, N., & Sudjiono, S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2015-2019. *RISK : Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 123–158. <https://doi.org/10.30737/risk.v2i2.2801>

- Sari, yulia A. (2021). PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>
- Septadarman, A. C., & Rambe, R. A. (2024). Analysis of the Influence of Population Growth, Education, and Health on Poverty in Indonesia from 2018 to 2022. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 129–142. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i1.7344>
- Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023). Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 151–160. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892>
- Tampubolon, H., & Muda, I. (2021). The effect of total population, median income, and unemployment rate on poverty risk in Europe. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 2(1), 430–434.
- Wooldridge, J. M. (2003). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2th ed.). MIT Press.
- Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(3), 33–42. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284>